MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 546 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan

b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 386 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-290/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 24438/B-BP.02.01/SD/K/2022 tanggal 29 Juli 2022;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan;

5. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Masa Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

KETIGA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

KEEMPAT : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan.

KELIMA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Peneliti pada Instansi Pemerintah merujuk pada Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.

KEENAM : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 20 Juli 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN CCCLIII
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 596 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN
2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA GURU

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	AHLI PERTAMA - GURU IPS	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	TOTAL	38	

BHINNEKA TUNGGAL IKA
panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN CCCLIII
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 546 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN
2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	2	28812	RSUD I LAGALIGO
2.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	1	28812	RSUD I LAGALIGO
3.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	25115	PUSKESMAS ANGKONA
4.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	25121	PUSKESMAS TIMAMPU
5.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	25117	PUSKESMAS LAMPIA
6.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	25119	PUSKESMAS BANTILANG
7.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	25122	PUSKESMAS NUHA
8.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	25111	PUSKESMAS BURAU
9.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	25114	PUSKESMAS TOMINI TIMUR
10.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	4	502	DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR
11.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	25123	PUSKESMAS WASUPONDA
12.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	10	28812	RSUD I LAGALIGO
13.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	25124	PUSKESMAS MANGKUTANA
14.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2	25113	PUSKESMAS TOMONI
15.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2	25112	PUSKESMAS WOTU
16.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	25118	PUSKESMAS MAHALONA
17.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	40879	PUSKESMAS LAKAWALI
18.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	25125	PUSKESMAS KALAENA
19.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	3	28812	RSUD I LAGALIGO
20.	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	25112	PUSKESMAS WOTU
21.	AHLI PERTAMA - BIDAN	3	28812	RSUD I LAGALIGO
22.	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	25124	PUSKESMAS MANGKUTANA
23.	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	25115	PUSKESMAS ANGKONA
24.	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	25119	PUSKESMAS BANTILANG
25.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	25112	PUSKESMAS WOTU
26.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	25114	PUSKESMAS TOMINI TIMUR
27.	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	90988	PUSKESMAS BONE PUTE
28.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	25121	PUSKESMAS TIMAMPU
29.	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	25120	PUSKESMAS WAWONDULA
30.	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	25119	PUSKESMAS BANTILANG
31.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	25125	PUSKESMAS KALAENA
32.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	40894	PUSKESMAS PARUMPANAI
33.	AHLI PERTAMA - DOKTER	3	28812	RSUD I LAGALIGO
34.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	25123	PUSKESMAS WASUPONDA
35.	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	25115	PUSKESMAS ANGKONA
36.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	25122	PUSKESMAS NUHA
37.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	25116	PUSKESMAS MALILI
38.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	25111	PUSKESMAS BURAU
39.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	90988	PUSKESMAS BONE PUTE
40.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	25118	PUSKESMAS MAHALONA
41.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	25123	PUSKESMAS WASUPONDA
42.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	25119	PUSKESMAS BANTILANG
43.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	28812	RSUD I LAGALIGO
44.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	25124	PUSKESMAS MANGKUTANA
45.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	25111	PUSKESMAS BURAU
46.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	25113	PUSKESMAS TOMONI
47.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	25114	PUSKESMAS TOMINI TIMUR
48.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	25116	PUSKESMAS MALILI
49.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	25117	PUSKESMAS LAMPIA
50.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	25125	PUSKESMAS KALAENA
51.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	90988	PUSKESMAS BONE PUTE

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
52.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	2	502	DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR
53.	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	1	28812	RSUD I LAGALIGO
54.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	25123	PUSKESMAS WASUPONDA
55.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	25119	PUSKESMAS BANTILANG
56.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	25122	PUSKESMAS NUHA
57.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	2	28812	RSUD I LAGALIGO
58.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	2	25118	PUSKESMAS MAHALONA
59.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	90988	PUSKESMAS BONE PUTE
60.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	25125	PUSKESMAS KALAENA
61.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	25117	PUSKESMAS LAMPIA
62.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	25118	PUSKESMAS MAHALONA
63.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	6	25112	PUSKESMAS WOTU
64.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	90988	PUSKESMAS BONE PUTE
65.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	40879	PUSKESMAS LAKAWALI
66.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	25115	PUSKESMAS ANGKONA
67.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	25124	PUSKESMAS MANGKUTANA
68.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	25116	PUSKESMAS MALILI
69.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	25111	PUSKESMAS BURAU
70.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	10	28812	RSUD I LAGALIGO
71.	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	1	28812	RSUD I LAGALIGO
72.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	28812	RSUD I LAGALIGO
73.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	40879	PUSKESMAS LAKAWALI
74.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	25124	PUSKESMAS MANGKUTANA
75.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	25125	PUSKESMAS KALAENA
76.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	25113	PUSKESMAS TOMONI
77.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	25117	PUSKESMAS LAMPIA
78.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	25119	PUSKESMAS BANTILANG
79.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	25111	PUSKESMAS BURAU
80.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	25121	PUSKESMAS TIMAMPU
81.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	25115	PUSKESMAS ANGKONA
82.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	25114	PUSKESMAS TOMINI TIMUR
83.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	2	25112	PUSKESMAS WOTU
84.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	25118	PUSKESMAS MAHALONA
85.	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	4	28812	RSUD I LAGALIGO
86.	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	25111	PUSKESMAS BURAU
87.	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	25115	PUSKESMAS ANGKONA
88.	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	25112	PUSKESMAS WOTU
89.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	2	28812	RSUD I LAGALIGO
90.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	25123	PUSKESMAS WASUPONDA
91.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	2	25117	PUSKESMAS LAMPIA
92.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	2	25119	PUSKESMAS BANTILANG
93.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	3	502	DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR
94.	TERAMPIL - BIDAN	4	25118	PUSKESMAS MAHALONA
95.	TERAMPIL - BIDAN	3	25117	PUSKESMAS LAMPIA
96.	TERAMPIL - BIDAN	3	25119	PUSKESMAS BANTILANG
97.	TERAMPIL - BIDAN	1	25116	PUSKESMAS MALILI
98.	TERAMPIL - BIDAN	2	25124	PUSKESMAS MANGKUTANA
99.	TERAMPIL - BIDAN	6	25125	PUSKESMAS KALAENA
100.	TERAMPIL - BIDAN	3	40879	PUSKESMAS LAKAWALI
101.	TERAMPIL - BIDAN	2	40894	PUSKESMAS PARUMPANAI
102.	TERAMPIL - BIDAN	1	90988	PUSKESMAS BONE PUTE
103.	TERAMPIL - BIDAN	7	25111	PUSKESMAS BURAU

BHINNEKA TUNGGAL IKA
panrb
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
104.	TERAMPIL - BIDAN	2	25112	PUSKESMAS WOTU
105.	TERAMPIL - BIDAN	3	28812	RSUD I LAGALIGO
106.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	3	28812	RSUD I LAGALIGO
107.	TERAMPIL - PERAWAT	1	25119	PUSKESMAS BANTILANG
108.	TERAMPIL - PERAWAT	2	25111	PUSKESMAS BURAU
109.	TERAMPIL - PERAWAT	1	25122	PUSKESMAS NUHA
110.	TERAMPIL - PERAWAT	6	25112	PUSKESMAS WOTU
111.	TERAMPIL - PERAWAT	5	25124	PUSKESMAS MANGKUTANA
112.	TERAMPIL - PERAWAT	7	40894	PUSKESMAS PARUMPANAI
113.	TERAMPIL - PERAWAT	2	25117	PUSKESMAS LAMPIA
114.	TERAMPIL - PERAWAT	1	25116	PUSKESMAS MALILI
115.	TERAMPIL - PERAWAT	1	25115	PUSKESMAS ANGKONA
116.	TERAMPIL - PERAWAT	8	25118	PUSKESMAS MAHALONA
117.	TERAMPIL - PERAWAT	10	28812	RSUD I LAGALIGO
118.	TERAMPIL - PERAWAT	2	40879	PUSKESMAS LAKAWALI
119.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	25113	PUSKESMAS TOMONI
120.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	2	40894	PUSKESMAS PARUMPANAI
121.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	90988	PUSKESMAS BONE PUTE
122.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	25115	PUSKESMAS ANGKONA
123.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	25123	PUSKESMAS WASUPONDA
124.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	25111	PUSKESMAS BURAU
125.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	25118	PUSKESMAS MAHALONA
126.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	28812	RSUD I LAGALIGO
127.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	25121	PUSKESMAS TIMAMPU
128.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	25116	PUSKESMAS MALILI
129.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	40879	PUSKESMAS LAKAWALI
130.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	25114	PUSKESMAS TOMINI TIMUR
131.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	25116	PUSKESMAS MALILI
132.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	25119	PUSKESMAS BANTILANG
133.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	25111	PUSKESMAS BURAU
134.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	25122	PUSKESMAS NUHA
135.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	90988	PUSKESMAS BONE PUTE
136.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	40879	PUSKESMAS LAKAWALI
137.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	28812	RSUD I LAGALIGO
138.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	40894	PUSKESMAS PARUMPANAI
139.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	25114	PUSKESMAS TOMINI TIMUR
140.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	25125	PUSKESMAS KALAENA
141.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	25120	PUSKESMAS WAWONDULA
142.	TERAMPIL - RADIOGRAFER	3	28812	RSUD I LAGALIGO
143.	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	2	28812	RSUD I LAGALIGO
144.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	2	28812	RSUD I LAGALIGO
145.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	90988	PUSKESMAS BONE PUTE
146.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	25121	PUSKESMAS TIMAMPU
147.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	25120	PUSKESMAS WAWONDULA
148.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	40879	PUSKESMAS LAKAWALI
149.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	25112	PUSKESMAS WOTU
150.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	25119	PUSKESMAS BANTILANG
	TOTAL	277		

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN CCCLIII
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 546 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN
2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ILMU KOMPUTER	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	S-1 REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN;D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA;D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI GEDUNG;S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK ELEKTRO;D-IV TEKNIK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA;D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA;S-1 TEKNIK KESELAMATAN	3	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
3.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAGEMEN;S-1 EKONOMI;S-1 SOSIAL DAN POLITIK;S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN;S-1 HUKUM;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 PENDIDIKAN;S-1 ADMINISTRASI;S-1 PEMERINTAHAN;S-1 TEKNIK	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
4.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 EKONOMI;S-1 HUKUM;S-1 MANAGEMEN;S-1 ADMINISTRASI;S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN;S-1 PEMERINTAHAN;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 SOSIAL DAN POLITIK;S-1 PENDIDIKAN	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN PEMERINTAHAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
5.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , KUMPULAN JABATAN FUNGSIONAL
6.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA;ADMINISTRASI	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
7.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN ORGANISASI , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
8.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA;S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PENDIDIKAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
9.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA;S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS KESEHATAN , KUMPULAN JABATAN FUNSIONAL
10.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN;S-1 KEARSIPAN;S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN;S-1 ADMINISTRASI	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , INSPEKTORAT , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
11.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN;S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN;S-1 ADMINISTRASI	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
12.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI;S-1 EKONOMI;S-1 MANAGEMEN;S-1 KEARSIPAN	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN UMUM , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
13.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN;S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN;S-1 ADMINISTRASI	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS KESEHATAN , KUMPULAN JABATAN FUNSIONAL
14.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN;S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN;S-1 ADMINISTRASI	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
15.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 EKONOMI;S-1 MANAGEMEN;S-1 ADMINISTRASI;S-1 KEARSIPAN	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA , KUMPULAN JABATAN FUNGSIONAL
16.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 EKONOMI;S-1 KEARSIPAN;S-1 MANAGEMEN;S-1 ADMINISTRASI	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
17.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN;S-1 ADMINISTRASI;S-1 KEARSIPAN;S-1 TEKNIK	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bhinneka Tunggal Ika
Salinan
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
18.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 KEARSIPAN;S-1 MANAJEMEN;S-1 EKONOMI;S-1 ADMINISTRASI	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , CAMAT ANGKONA , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
19.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI;S-1 EKONOMI;S-1 KEARSIPAN;S-1 MANAGEMEN	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , KUMPULAN JABATAN FUNGSIONAL
20.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 EKONOMI;S-1 MANAGEMEN;S-1 KEARSIPAN;S-1 ADMINISTRASI	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
21.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 EKONOMI;S-1 ADMINISTRASI;S-1 MANAJEMEN;S-1 KEARSIPAN	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
22.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI;S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN;S-1 KEARSIPAN	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
23.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 EKONOMI;S-1 KEARSIPAN;S-1 TEKNIK;S-1 MANAGEMEN;S-1 ADMINISTRASI	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
24.	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	PROFESI DOKTER HEWAN	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PERTANIAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
25.	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 PEKERJAAN SOSIAL;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL;D-IV PEKERJAAN SOSIAL	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
26.	AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 ARSITEKTUR;S-1 PLANOLOGI;S-1 TEKNIK PENGAIRAN;S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
27.	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	S-1 MANAJEMEN BENCANA;S-1 TEKNIK GEOLOGI;S-1 TEKNIK LINGKUNGAN;S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 PLANOLOGI;S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT	2	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
28.	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 ARSITEKTUR;S-1 PLANOLOGI	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
29.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 BIOLOGI;S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN;S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN;S-1 KIMIA;S-1 ILMU TANAH;S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
30.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI;D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
31.	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	S-1 KOMUNIKASI;S-1 KESEHATAN MASYARAKAT;S-1 HUKUM;S-1 PSIKOLOGI;S-1 SOSIOLOGI	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , KUMPULAN JABATAN FUNGSIONAL
32.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN;S-1 TEKNIK PERTANIAN;S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN;S-1 PETERNAKAN;S-1 AGROBISNIS;S-1 AGROTEKNOLOGI;S-1 TANAMAN PANGAN;S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN;S-1 PERKEBUNAN	5	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PERTANIAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
33.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI;S-1 MANAGEMEN;S-1 AKUNTANSI;S-1 ADMINISTRASI;S-1 HUKUM;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS KESEHATAN , KUMPULAN JABATAN FUNSIONAL
34.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN;S-1 AKUNTANSI;S-1 ADMINISTRASI;S-1 HUKUM;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PERTANIAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
35.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI;S-1 MANAGEMEN;S-1 AKUNTANSI;S-1 ADMINISTRASI;S-1 HUKUM;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
36.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI;S-1 MANAGEMEN;S-1 AKUNTANSI;S-1 ADMINISTRASI;S-1 HUKUM;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
37.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN;S-1 AKUNTANSI;S-1 ADMINISTRASI;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 SOSIAL DAN POLITIK;S-1 HUKUM	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , KUMPULAN JABATAN FUNGSIONAL
38.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI;S-1 ADMINISTRASI;S-1 MANAJEMEN;S-1 AKUNTANSI;S-1 HUKUM;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , INSPEKTORAT , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
39.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN;S-1 AKUNTANSI;S-1 ADMINISTRASI;S-1 HUKUM;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
40.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI;S-1 MANAGEMEN;S-1 AKUNTANSI;S-1 ADMINISTRASI;S-1 HUKUM;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
41.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN;S-1 EKONOMI;S-1 HUKUM;S-1 ADMINISTRASI;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 AKUNTANSI;S-1 SOSIAL DAN POLITIK;ADMINISTRASI	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
42.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI;S-1 ADMINISTRASI;S-1 MANAJEMEN;S-1 AKUNTANSI;S-1 HUKUM;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
43.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN;S-1 AKUNTANSI;S-1 ADMINISTRASI;S-1 HUKUM;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
44.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI;S-1 EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;S-1 ADMINISTRASI;S-1 HUKUM;S-1 SOSIAL DAN POLITIK;S-1 KOMUNIKASI;S-1 MANAJEMEN	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
45.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN;S-1 EKONOMI;S-1 HUKUM;S-1 AKUNTANSI;S-1 ADMINISTRASI;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
46.	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	S-1 ILMU HUKUM;S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK/NEGARA;S-1 ILMU EKONOMI;S-1 ILMU MANAJEMEN	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN HUKUM , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
47.	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	S-1 ILMU HUKUM;S-1 ILMU EKONOMI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK/NEGARA	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , SEKRETARIAT DPRD , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
48.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL;S-1 SARJANA HUKUM;S-1 MANAJEMEN;S-1 JURNALISTIK;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 POLITIK;S-1 ADMINISTARI NEGERA	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DANKOMUNIKASI PIMPINAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
49.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU KOMPUTER	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA , KUMPULAN JABATAN FUNGSIONAL
50.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 INFORMATIKA;S-1 ILMU INFORMATIKA;S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER	5	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
51.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ILMU KOMPUTER	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
52.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 SISTEM INFORMASI	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
53.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
54.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
55.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 ILMU KOMPUTER	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
56.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
57.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
58.	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT	20	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
59.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III EKONOMI;D-III MANAJEMEN;D-III ADMINISTRASI;D-III KEARSIPAN	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PERHUBUNGAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
60.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KESEKRETARIATAN;D-III KEARSIPAN;D-III EKONOMI;D-III MANAJEMEN;D-III ADMINISTRASI	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , CAMAT BURAU , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
61.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN;D-III KESEKRETARIATAN;D-III EKONOMI;D-III ADMINISTRASI;D-III MANAJEMEN	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , CAMAT WASUPONDA , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
62.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN;D-III KESEKRETARIATAN;D-III ADMINISTRASI;D-III MANAJEMEN;D-III EKONOMI	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , CAMAT MALILI , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
63.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III EKONOMI;D-III MANAJEMEN;D-III KESEKRETARIATAN;D-III KEARSIPAN;D-III ADMINISTRASI	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , CAMAT ANGKONA , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
64.	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
65.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
		TOTAL	95	

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 11 September 2023

Kepada
Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
di -
Jakarta

Nomor : 800/937/BKPSDM
Lampiran : 1 (satu) examplar
Perihal : **Pengusulan Pengurangan Alokasi PPPK JF Teknis**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 571 Tahun 2023, tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022, tanggal 02 Agustus 2023, maka dengan ini disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mendapat 49 Formasi Jabatan Hasil Optimalisasi dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut maka diusulkan pengurangan Formasi Jabatan Fungsional Tekhnis 30 Formasi sebagaimana tercantum dalam daftar usulan terlampir.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Jabatan tersebut tidak lagi terakomodir pada Formasi pengadaan ASN Tahun 2023 karena sudah terpenuhi dari hasil Optimalisasi sesuai Analis Beban Kerja (ABK) pada Unit Kerja masing-masing.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Malili, 11 September 2023

BUPATI LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Tembusan Yth :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
   Cq. Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen BKN di Jakarta;
3. Kementrian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
   Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah
2. Gubernur Sulawesi Selatan.
   Cg. Kepala BKD di Makassar;
3. Kepala BKN Regional IV Makassar di Makassar;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR USULAN PENGURANGAN ALOKASI PPPK JF TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK		UNIT PENEMPATAN
			SEMULA	MENJADI	
1	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 MANAJEMEN; S-1 EKONOMI; S-1 SOSIAL DAN POLITIK; S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN; S-1 HUKUM; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 PENDIDIKAN; S-1 ADMINISTRASI; S-1 PEMERINTAHAN; S-1 TEKNIK	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
2	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PENDIDIKAN, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
3	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN ORGANISASI, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
4	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI; S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 KEARSIPAN	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 EKONOMI; S-1 KEARSIPAN; S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
6	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN; S-1 KEARSIPAN; S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , INSPEKTORAT, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
7	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 KEARSIPAN; S-1 ADMINISTRASI	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
8	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI; S-1 KEARSIPAN;	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
9	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ADMINISTRASI; S-1 EKONOMI; S-1 KEARSIPAN; S-1 MANAJEMEN	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
10	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 EKONOMI; S-1 ADMINISTRASI; S-1 MANAJEMEN; S-1 KEARSIPAN	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

11	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 PEKERJAAN SOSIAL; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL; D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL; D-IV PEKERJAAN SOSIAL	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
12	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI; S-1 ADMINISTRASI; S-1 HUKUM; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
13	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI; S-1 ADMINISTRASI; S-1 HUKUM; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PERTANIAN, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
14	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN; S-1 EKONOMI; S-1 HUKUM; S-1 AKUNTANSI; S-1 ADMINISTRASI; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
15	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI; S-1 EKONOMI; S-1 AKUNTANSI; S-1 ADMINISTRASI; S-1 HUKUM; S-1 SOSIAL DAN POLITIK; S-1 KOMUNIKASI; S-1 MANAJEMEN	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
16	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI; S-1 ADMINISTRASI; S-1 HUKUM; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
17	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI; S-1 ADMINISTRASI; S-1 HUKUM; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
18	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI; S-1 ADMINISTRASI; S-1 HUKUM; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
19	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI; S-1 ADMINISTRASI; S-1 HUKUM; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS KESEHATAN, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
20	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI; S-1 ADMINISTRASI; S-1 HUKUM; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
21	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	S-1 ILMU HUKUM; S-1 ILMU EKONOMI; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ILMU ADMINISTRASI	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, SEKRETARIAT DPRD, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

		PUBLIK/NEGARA			
22	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 SISTEM KOMPUTER	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
23	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
24	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
25	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
26	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 INFORMATIKA; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER	5	2	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
28	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 ILMU KOMPUTER	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
29	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 SISTEM KOMPUTER	1	0	BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Malili, 11 September 2023

BUPATI LUWU TIMUR

Drs.H. BUDIMAN, M.Pd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN